

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku – buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, AdityaBakti, Bandung, 2004.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Arie Sukanti Hutagalung dkk, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Bali, 2012.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, CV Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2012.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

Redaksi RAS, *Tanah dan Bangunan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.

Rinto Manulang, *Tanah rumah dan perizinannya*, Buku Pintar, 2011.

Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan cara litigasi dan non litigasi*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Mufakat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

## **2. Peraturan Perundang – undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **3. Interview**

Hasil wawancara dengan Bapak Khoiri Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pada Hari Jum'at 1/04/2016.